

ABSTRAK

Permasalahan mengenai Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam setiap akhir pemilihan umum di Indonesia, khususnya pada pemilihan presiden 2009 telah menjadi suatu ajang perdebatan dan polemik di antara para politisi. Silangkata ataupun polemik telah mendorong lahirnya suatu konflik pendapat di antara para politisi ataupun di antara partai-partai politik yang memiliki kepentingan atas hasil akhir dari pemilihan tersebut melalui perhitungan suara.

Media massa dengan gencar menayangkan konflik tentang DPT ke khalayak pemirsa. Keberpihakan media pada saat menyajikan berita ini merupakan sesuatu yang sulit dihindari, setiap media mempunyai keberpihakan yang berbeda-beda, karena tidak mungkin media tidak memihak terhadap sesuatu. Dalam hal ini, keberpihakan media dipengaruhi oleh visi, misi dan ideologi yang digunakan media tersebut.

Berdasarkan fenomena di atas maka dalam penelitian ini bertujuan mengkaji dan menganalisis Metro TV dan TV One dalam mendefinisikan masalah, memperkirakan sumber masalah, membuat keputusan moral dan menekankan penyelesaian dalam Konflik Seputar DPT pasca Pilpres 2009. Penelitian ini dilakukan pendekatan kualitatif dengan menggunakan analisis framing dari Robert N. Entman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) Definisi Realitas: Secara umum Metro TV, di satu sisi, lebih mengafirmasi definisi realitas yang dikemukakan oleh pasangan capres/cawapres dan partai pendukung, serta golongan masyarakat. Dan di sisi lain, memberikan negasi atas definisi realitas yang dikemukakan oleh KPU/KPUD dan pemerintah. Sebaliknya TV One, di satu sisi lebih mengafirmasi definisi realitas yang dikemukakan oleh Pemerintah, KPU/KPUD dan golongan masyarakat. Dan di sisi lain, menegasi definisi realitas yang dikemukakan oleh pasangan capres/cawapres dan partai pendukung. (2) Metro TV, menganggap sumber masalahnya adalah Pemerintah dan KPU. Sebaliknya, TV One melihat bahwa sumber permasalahan bukanlah KPU atau pemerintah, tapi hanya sekedar kesalahan administrasi dalam soal pendataan pemilih. (3) Secara umum keputusan moral yang diajukan oleh Metro TV adalah bahwa Kisruh DPT bermasalah secara moral dan politis. Hal ini berbeda dengan keputusan moral yang diajukan oleh TV One bahwa kisruh DPT memang bermasalah, namun semata administratif. (4) Secara umum rekomendasi penyelesaian yang diajukan oleh Metro TV adalah mendesak KPU dan Kementerian Dalam Negeri untuk menuntaskan masalah DPT. Di lain pihak, rekomendasi penyelesaian yang diajukan oleh TV One adalah bahwa pilpres tetap harus berjalan, tidak ada pengunduran dan tidak akan ditunda.